



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Nilai-Nilai Integritas Satgas Saber Pungli**  
**Provinsi Jawa Barat dalam Pemberantasan**  
**Pungutan Liar**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Oleh

Hanif Ramadhansyah

6072001006

Bandung

2024



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN –PT NO. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**Nilai-Nilai Integritas Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa  
Barat dalam Pemberantasan  
Pungutan Liar**

Skripsi

Oleh

Hanif Ramadhansyah

6072001006

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA

Bandung

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Hanif Ramadhansyah  
Nomor Pokok : 6072001006  
Judul : Nilai-Nilai Integritas Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam Pemberantasan Pungutan Liar

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 22 Juli 2024  
Dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

:   
\_\_\_\_\_

**Sekretaris**  
Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

:   
\_\_\_\_\_

**Anggota**  
Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

:   
\_\_\_\_\_

.30\_07\_2024

Mengesahkan,  
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Orpha Jane

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Ramadhansyah  
NPM : 6072001006  
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Nilai-Nilai integritas Satgas Saber Pungli Provinsi  
Jawa Barat dalam Pemberantasan Pungutan Liar.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

**Bandung, 16 Juli 2024**



Hanif Ramadhansyah

## Nilai-nilai Integritas Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam Pemberantasan Pungutan Liar

---

ORIGINALITY REPORT

---

**24%**  
SIMILARITY INDEX

**23%**  
INTERNET SOURCES

**12%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS

---

## ABSTRAK

**Nama : Hanif Ramadhansyah**

**NPM : 6072001006**

**Judul : Nilai-Nilai Integritas Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat  
dalam Pemberantasan Pungutan Liar**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai integritas yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat. Pungutan liar merupakan masalah serius yang mengancam integritas pelayanan publik di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, dibentuklah Satgas Saber Pungli dengan tujuan memberantas praktik pungli dan memastikan pelayanan publik yang bersih, adil, dan berintegritas. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa Satgas Saber Pungli adalah pihak yang diharapkan mempunyai nilai integritas yang tinggi karena bertugas menegakkan integritas di berbagai sektor. Sesuai dengan observasi awal penelitian, diperoleh temuan bahwa Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat terindikasi kuat memiliki nilai integritas yaitu bertanggung jawab dan kerja keras.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model fenomenologi untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman masyarakat ketika mereka melakukan pengaduan pungutan liar kepada Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan melalui proses wawancara dengan 7 orang informan lalu pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teridentifikasi enam nilai integritas yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, yaitu: (1) Kejujuran, (2) Kedisiplinan, (3) Bertanggung Jawab, (4) Keberanian, (5) Kepedulian, dan (6) Keadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa meskipun Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya dalam memberantas pungutan liar, masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek operasional Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat.

---

**Kata Kunci** : Nilai-nilai integritas, Satgas Saber Pungli, Pungutan Liar

## ABSTRACT

**Name : Hanif Ramadhansyah**

**Student ID : 6072001006**

**Title : Integrity Values of the Saber Pungli Task Force of West Java in Combating Illegal Levies**

---

*This research aims to identify the integrity values possessed by the West Java Province Saber Extortion Task Force. Illegal levies are a serious problem that threatens the integrity of public services in Indonesia. To overcome this problem, the Saber Extortion Task Force was formed with the aim of eradicating the practice of extortion and ensuring public services that are clean, fair and have integrity. Based on these objectives, it can be understood that the Saber Extortion Task Force is a party that is expected to have high integrity values because it is tasked with upholding integrity in various sectors. In accordance with initial research observations, findings were obtained that the West Java Province Saber Extortion Task Force had strong indications of having integrity values, namely responsibility and hard work*

*This research uses qualitative methods with a phenomenological model to gain an in-depth understanding of people's experiences when they complain about illegal levies to the West Java Province Saber Extortion Task Force. The data collection technique for this research is through an interview process with 7 informants and then the selection of informants is carried out using a purposive sampling method, where informants are selected based on certain criteria that are relevant to the research objectives.*

*The research results showed that six integrity values were identified as possessed by the West Java Province Extortion Saber Task Force, namely: (1) Honesty, (2) Discipline, (3) Responsibility, (4) Courage, (5) Caring, and (6) Justice. This research provides an understanding that although the Saber Extortion Task Force has made efforts to eradicate illegal levies, there are still many challenges that must be overcome so that more concrete steps are needed to increase the application of integrity values in every aspect of the Task Force's operations. West Java Province Extortion Saber*

---

**Keywords:** *Integrity values, Saber Pungli Task Force, Transparency, Illegal Levies*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Strata-1 di Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak bantuan serta dukungan yang diterima. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yang telah menyemangati dan mendoakan selama proses pengerjaan penelitian.
2. Dosen pembimbing, Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. Terima kasih banyak atas saran, pengarahan, dan masukan yang telah diberikan serta berbagai ilmu yang berharga.
3. Seluruh dosen Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan bekal ilmu kepada peneliti.
4. Puri Ayu Boys Club yang selalu menyemangati dan juga menghibur peneliti.
5. Teman-teman peneliti yaitu Lukman, Daffa, Rizal, Ulivia, Jonathan yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungannya kepada peneliti.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat penggunaan kata yang tidak sesuai. semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandung, 12 Juli 2024

Hanif Ramadhansyah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Integritas.....	14
2.2.1 Nilai-Nilai Integritas.....	16
2.3 Nilai-Nilai Integritas Birokrasi Publik .....	22
2.4 Kerangka Berpikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Model Penelitian.....	26
3.3 Peran Peneliti.....	27
3.4 Lokasi Penelitian .....	27
3.5 Sumber Data .....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7 Teknik Sampling .....	29
3.8 Analisis data .....	30
3.9 Validitas Data .....	32
3.9 Tabel Pengumpulan Data .....	32
3.10.1. Nilai-Nilai Integritas.....	32
<b>BAB IV PROFIL PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat .....	34
4.2 Visi dan Misi Saber Pungli.....	34
4.3 Tugas dan Fungsi Saber Pungli .....	35

4.4 Struktur Organisasi.....	38
<b>BAB V TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
5.1 Informan Penelitian .....	39
5.2. Temuan Nilai-Nilai Integritas yang Dimiliki oleh Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam Memberantas Pungutan Liar .....	40
5.2.1. Nilai Kejujuran .....	40
5.2.2. Nilai Kedisiplinan.....	41
5.2.3. Nilai Bertanggung Jawab .....	43
5.2.4. Nilai Keberanian.....	45
5.2.5. Nilai Kepedulian.....	46
5.2.6. Nilai Keadilan.....	48
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
6.1. Nilai-Nilai Integritas Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam Memberantas Pungutan Liar .....	51
6.1.1. Nilai Kejujuran .....	51
6.1.2. Nilai Kedisiplinan.....	55
6.1.3. Nilai Bertanggung Jawab .....	58
6.1.4. Nilai Keberanian.....	61
6.1.5. Nilai Kepedulian.....	64
6.1.6. Nilai Keadilan.....	67
<b>BAB VII KESIMPULAN.....</b>	<b>70</b>
7.1. Kesimpulan Penelitian.....	70
7.2. Saran Penelitian.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3. 1. Pengumpulan Data .....	33
Tabel 5. 1 Informan Penelitian.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir .....	25
Gambar 3. 1 Model Interaktif Miles dan Huberman .....	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	38

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Integritas merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Permasalahan ini paling tidak terlihat dari tren korupsi di Indonesia. Dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis Transparency International pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-115 dari 180 negara dengan skor 34 dari skala 0-100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih.<sup>1</sup> Skor ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas di Indonesia masih memiliki tantangan yang signifikan. Secara umum, permasalahan integritas di Indonesia dapat dilihat pada sektor pemerintahan. Di sektor pemerintahan, masih sering terjadi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pemberian layanan publik yang tidak transparan.<sup>2</sup>

Permasalahan integritas di Indonesia sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya integritas di sektor pemerintahan adalah sistem birokrasi yang masih rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Praktik seperti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pelayanan publik lainnya.<sup>3</sup> Hal ini tentunya

---

<sup>1</sup> Transparency International. (2023). Corruption Perceptions Index 2023. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Laporan Tahunan KPK 2022. <https://www.kpk.go.id/laporan-tahunan>

<sup>3</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022. <https://www.menpan.go.id/site/publikasi>

berdampak buruk pada kualitas layanan yang diterima masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Praktik KKN termasuk korupsi merupakan hambatan utama dalam mencapai birokrasi yang berintegritas. Praktik korupsi merugikan negara secara finansial dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.<sup>4</sup> Akibat dari korupsi tidak hanya memberikan kerugian bagi negara saja tetapi juga dapat mempengaruhi dan merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan juga pembangunan. Keadaan seperti ini sangat merugikan bagi kemajuan dan stabilitas negara karena korupsi tidak hanya menguras sumber daya negara, tetapi juga melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan dan bentuk mulai dari penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi hingga manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Korupsi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari ialah pungutan liar atau pungli, di mana masyarakat dikenakan biaya tambahan yang tidak wajar untuk mendapatkan layanan atau izin tertentu. Hal ini tidak hanya merugikan secara finansial bagi individu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat.

---

<sup>5</sup> Fitri Lestari, Nur Rochaeti, Suhartoyo, *Penegakan Hukum Pungutan Liar Oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, (2018), hlm.182.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya.<sup>5</sup> Kebanyakan pungli dilakukan oleh pejabat atau aparat, meskipun pungli merupakan tindakan ilegal dan digolongkan sebagai KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Namun, pungli ini sebenarnya sangat umum di Indonesia dimana masyarakat sudah akrab dengan tindak pidana pungutan liar. Secara yuridis, pungutan liar adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan jabatan jika pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Pungli atau pungutan liar sebenarnya juga merupakan bentuk korupsi yang sistemik dan mengakar di Indonesia. Pungutan Liar pada praktiknya dilakukan dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini juga sering juga disamakan dengan tindakan pemerasan atau korupsi. Pemerasan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya. Pungli dikenal dengan istilah lain yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu uang sogokan ataupun uang pelicin.

Praktek pungli biasanya terjadi pada instansi pemerintah pemberi pelayanan yang prosedurnya tidak transparan, berbelit-belit, dan tidak ada kepastian dalam lama waktu penyelesaiannya. Selain itu praktek pungutan liar juga melanggar hak-

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 183

<sup>7</sup> Arleta, G, *UPAYA PENINDAKAN PEMBERANTASAN PUNGLI OLEH SATGAS SABER PUNGLI. LITIGASI*, (2020), hlm. 151.

hak warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas pelayanan publik. Pungutan Liar ini merupakan suatu tindak pidana yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 368, 423, 425 KUHP dan pungutan ini juga sering disebut sebagai suatu perbuatan korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pungutan liar sebagai tindakan ilegal dapat digolongkan ke dalam korupsi yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau siapapun dengan menyalahgunakan wewenang dari jabatannya yang memperoleh gaji dari keuangan negara dan pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap keuangan dan juga perekonomian negara demi kepentingan pribadi ataupun orang lain secara langsung maupun tidak langsung.

Urgensi penanggulangan pungli pada birokrasi di Indonesia ditindaklanjuti dengan kemunculan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli. Peraturan tersebut merupakan sebuah payung hukum bagi pembentukan tim khusus pemberantasan pungutan liar yang disebut Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan liar mempunyai tugas untuk memberantas pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien. Untuk menindak pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien tentu Saber Pungli perlu memegang erat integritas. Dalam pelaksanaannya Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan liar dibentuk di tingkat provinsi dan daerah. Seluruh kegiatan Saber Pungli dilakukan di semua wilayah Indonesia, termasuk 34 provinsi dan 495 kota maupun kabupaten untuk memberantas pungutan liar.

Peraturan Presiden ini menekankan bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberantas pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing serta membentuk unit khusus untuk pemberantasan pungutan liar di dalam satuan pengawas internal atau unit kerja terkait. Selain menetapkan tugas dan wewenang Satgas Saber Pungli, peraturan ini juga menggarisbawahi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik maupun non-elektronik. Partisipasi masyarakat dapat berupa pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berisi instruksi bahwa Satgas Saber Pungli perlu mencegah dan menghapus pungli, khususnya pada beberapa area yang sangat luas dan penting area-area tersebut yaitu perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik, pengadaan barang dan kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan.

Peran Satgas Saber Pungli dalam memberantas praktik korupsi sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat integritas dalam birokrasi. Dengan fokus pada pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, Satgas Saber Pungli tidak hanya menegakkan aturan-aturan anti-korupsi, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sistem yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, Satgas Saber Pungli tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga simbol dari semangat untuk memperbaiki citra pemerintahan dan

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Hanya melalui langkah-langkah konkret seperti ini, integritas dalam birokrasi dapat terwujud, dan harapan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi menjadi lebih nyata.

Integritas merupakan salah satu unsur karakter yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas adalah kepatuhan tanpa kompromi terhadap kode nilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, dan kepalsuan. Integritas menuntut seseorang bersikap jujur, transparan, bijaksana dan bertanggung jawab dalam bekerja. Karakter-karakter inilah yang harus dimiliki agar seseorang dapat bebas dari korupsi. Tanpa adanya integritas dalam diri seseorang, hampir mustahil korupsi dapat diberantas. Sesempurna apapun sebuah sistem akan menjadi sistem yang korup apabila dijalankan oleh orang-orang yang korup dan tidak berintegritas.

Integritas bukan hanya didasarkan pada keinginan individu, tetapi juga merupakan hasil dari keinginan bersama yang harus dijalankan dengan konsisten, tulus, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab oleh setiap pegawai. Kesadaran terhadap nilai integritas mendorong pegawai untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab. Sikap integritas memainkan peran yang krusial dan memiliki pengaruh yang luas dalam mengembangkan serta membentuk perilaku pegawai dalam pekerjaan mereka. Selain itu, pegawai yang memiliki integritas mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi atau lembaga.

Integritas merupakan pondasi utama bagi sebuah lembaga yang bertugas melayani masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan dan

keadilan, sebuah lembaga tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga harus menjaga agar setiap interaksi dengan masyarakat dilakukan dengan kejujuran dan integritas yang tinggi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, lembaga-lembaga ini dapat menciptakan lingkungan yang transparan, dan membangun hubungan yang kuat serta berkelanjutan dengan publik.

Dalam upaya menjaga integritas adalah melalui keberadaan dari Satgas Saber Pungli. Satgas ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa praktik-praktik korupsi dan pungutan liar tidak merajalela di berbagai sektor pelayanan publik. Dengan melakukan investigasi, penindakan, dan pencegahan terhadap tindakan pungutan liar, Satgas Saber Pungli tidak hanya mengamankan dana publik, tetapi juga menegaskan komitmen mereka terhadap integritas sebagai lembaga penegak hukum.

Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli secara mutlak harus didukung dengan SDM yang berintegritas. Setiap anggota satgas harus memiliki integritas secara individu. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang ditunjukkan oleh anggota Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang kuat. Dengan demikian, Satgas Saber Pungli tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai teladan integritas bagi seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat secara luas.

Dengan adanya nilai integritas tinggi yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli, diharapkan praktik korupsi pada suatu organisasi atau lembaga dapat dicegah. Berdasarkan tugasnya untuk menegakan integritas, dapat dipahami bahwa

Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat harus mempunyai nilai-nilai integritas yang kuat karena integritas merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Berdasarkan pemahaman ini, peneliti menemukan indikasi di lapangan bahwa pegawai pada Satgas Saber Pungli Jawa Barat telah memiliki beberapa nilai integritas yang mencakup nilai kerja keras dan bertanggung jawab. Indikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Nilai Kerja Keras**

Pertama, Dalam berita, dikutip bahwa:

"Sebanyak 42 ribu kasus pungli diselesaikan oleh Tim Satgas Saber Pungli Jawa Barat selama enam tahun terakhir dan 102 kasus diungkap secara OTT (operasi tangkap tangan). Semuanya berakhir ke pengadilan,"<sup>7</sup> terang Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil.

Ini menunjukkan upaya serius Satgas Saber Pungli Jawa Barat dalam menangani dan memberantas praktik pungli terlihat dalam nilai integritas yaitu kerja keras dimana Satgas Saber Pungli melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Nilai kerja keras tersebut juga terlihat dalam jumlah kasus yang ditangani yaitu sebanyak 42 ribu kasus dalam kurun waktu enam tahun, di mana jumlah kasus yang diselesaikan tersebut sangat banyak.

### **2. Nilai Bertanggung Jawab**

Kedua, ditemukan kasus konkret di mana Satgas Saber Pungli Jawa Barat menangkap tangan kepala sekolah menengah kejuruan di Kota

---

<sup>8</sup> Sudrajat, Ajat. 2023. "Satgas Saber Pungli Jabar Selesaikan 42 Ribu Kasus Selama Enam Tahun." *Antara News*. ANTARA. Mei 12. <https://www.antaraneews.com/berita/3536328/satgas-saber-pungli-jabar-selesaikan-42-ribu-kasus-selama-enam-tahun>.

Bandung dan 4 stafnya. Penangkapan itu dilakukan karena kepala sekolah dan 4 staf itu diduga melakukan pungutan liar. Disebutkan:

"Ini penangkapan bermula dari dumas (pengaduan masyarakat) orang tua murid yang merasa keberatan terkait uang pramuka. Padahal kan pramukanya masih lama 20 Juli 2022, tapi kok sudah ada (iuran)", "modus operandi para pelaku melakukan aksi diduga pungutan liar itu dengan menginformasikan kepada orang tua murid tentang uang sumbangan berkisar Rp 3 juta dan uang pramuka Rp550.000."<sup>8</sup> terang Yudi Ahadia Humas Satgas Saber Pungli Jabar Kasus ini menunjukkan bagaimana Satgas Saber Pungli menjalankan tugasnya dengan nilai integritas bertanggung jawab dimana kasus tersebut bermula dari pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Satgas Saber Pungli yang mempunyai kewajiban untuk mengurusnya. Nilai integritas bertanggung jawab tersebut juga terlihat dari bagaimana Satgas Saber Pungli Jawa Barat melakukan pekerjaannya mulai dari pengaduan yang di ditangani lalu dilakukan penindakan tegas oleh Satgas Saber Pungli hingga berhasil menangkap para pelakunya.

Kedua bukti ini mengindikasikan bahwa Satgas Saber Pungli menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi, dengan bekerja keras dan bertanggung jawab baik dalam hal pencegahan maupun penindakan terhadap praktik pungli. Mereka konsisten dalam menegakkan aturan, merespons laporan masyarakat, dan

---

<sup>9</sup> Warsudi, Agus. 2022. "Heboh! Saber Pungli Jabar Tangkap Kepala Sekolah Kejuruan Di Bandung Terkait Pungutan Liar." *iNews.ID*. June 23. <https://jabar.inews.id/berita/heboh-saber-pungli-jabar-tangkap-kepala-sekolah-kejuruan-di-bandung-terkait-pungutan-liar/all>.

menindak tegas setiap pelaku tanpa pandang bulu. Integritas seperti inilah yang diperlukan untuk memberantas pungli secara efektif dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Integritas yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli akan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai integritas. Dengan mengidentifikasi secara mendalam nilai-nilai integritas yang menjadi landasan kerja Satgas Saber Pungli Jawa Barat, peneliti dapat mengetahui sejauh mana lembaga tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik dengan berfokus pada nilai-nilai integritas.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Apa nilai-nilai integritas yang dimiliki Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam memberantas pungutan liar?”**.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai integritas yang dimiliki Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam memberantas pungutan liar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai nilai-nilai integritas Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat dalam memberantas pungutan liar diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk bidang ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam pemberantasan pungutan liar.
2. Aspek Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi pihak yang terlibat, yaitu:
  - A. Satgas Saber Pungli. Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi Satgas Saber Pungli mengenai nilai-nilai integritas dalam upaya pemberantasan pungutan liar.
  - B. Penulis. Diharapkan melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan menganalisis serta pemahaman mengenai nilai-nilai integritas dalam konteks administrasi publik khususnya dalam pemberantasan pungutan liar.